

**ANALISIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LAUT
TADOR KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



Oleh:

Nama : Viona Kesuma Ningrum Damanik
NPM : 1405180022
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : VIONA KESUMA NINGRUM DAMANIK
N P M : 1405180022
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LAUT TADOR KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA

Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

MUKMIN POHAN, S.E., M.Si

Penguji II

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si

Pembimbing

Dra. Hj. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : VIONA KESUMA NINGRUM DAMANIK
N.P.M : 1405180022
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
LAUT TADOR KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU
BARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURIS SE, MM, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Viona Kesuma Ningrum Damanik
NPM : 1405180022
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Ekonomi Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 1... Januari 2018
Pembuat Pernyataan



Viona Kesuma Ningrum Damanik

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : VIONA KESUMA NINGRUM DAMANIK
N.P.M : 1405180022
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LAUT
TADOR KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
21-03-2018	- Menentukan deskripsi dan penelitian, dari segi geografis, demografi dan sosial ekonomi. Tampilkan dalam bentuk tabel atau grafik.	h	
23-03-2018	- Analisis perkembangan penduduk desa, cari % tase kenaikan, gambar dgn tabel atau grafik. - Masukkan rincian kegiatan penggunaan pendapatan desa dan analisa dgn men dulum.	h	
26-03-2018	- Uraikan efektivitas landingshow rencana dgn realisasi. Lihat kondisi di lapangan an. buat analisisnya dgn mendulum.	h	
27-03-2018	- Lengkapi abstrak, daftar isi dan lengkapi lampiran	h	
28-03-2018	Telah selesai diperiksa dan acc utk sidang.	h	

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

Medan, 28 Maret 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

ABSTRAK

Penelitian ini diberi judul Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Tujuan dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkembangan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dan efektifitas Alokasi Dana Desa di Desa laut Tador, Kecamatan Sei Suka, kabupaten Batu Bara Tahun 2015 sampai tahun 2017.

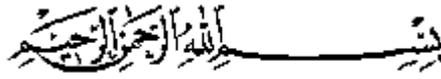
Adapun jenis penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian deskriptif. Tipe Penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa laut Tador, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Laut Tador, dilihat dari pencapaian tujuan dimana dapat diukur melalui jangka waktu dan dalam proses pencapaian tujuan terutama pada penggunaan anggaran ADD. Hasil dari Penggunaan ADD memang dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat, masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasinya dalam pembangunan sehingga pencapaian tujuan sasaran masih kurang efektif.
KataKunci : Analisis, Penggunaan, Alokasi Dana Desa.

ABSTRACT

This research is entitled Analysis of Village Fund Allocation Utilization in Desa Laut Tador Sei Suka Sub-district, Batu Bara Regency. The objectives of this research are basically to know the socio-economic condition of the community, the development and use of the Village Fund Allocation and the effectiveness of the Allocation of Village Funds in the Tador Marine Village, Sei Suka Sub-district, Batu Bara District from 2015 to 2017. The type of this research is descriptive research type. The research used is qualitative with descriptive descriptive that is a research aimed to obtain an overview to understand and explain the use of Village Fund Allocation (ADD) in Desa Laut Tador Village, Sei Suka Subdistrict, Regency Coal. The results of this study indicate that the use of Village Fund Allocation (ADD) in Laut Tador Village is seen from the achievement of objectives which can be measured over time and in the process of achieving the objectives, especially on the use of the ADD budget. The results of ADD use can be solved well but due to lack of transparency related to the implementation of planning activities by the village government to the community, the community can not convey their aspirations in the development so that the achievement of the target goal is still less effective. Keywords: Analysis, Use, Allocation of Village Funds.

MOTTO



Sesungguhnya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan

(QS AL – Insyirah)

Kepada ALLAH SUBHANA WATA'ALA

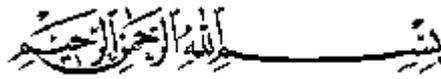
*Yang telah memberikan jalan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini
Ibu dan Bapakku tercinta untuk kasih sayang dari tiap tetes keringat yang telah
keluar dan tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun, dan Doa
Yang terus diberikan siang malam untuk kesuksesan dan kebahagiaanku,*

*Pacarku tercinta untuk doa dan dukungannya selama ini
menemaniku melewati cobaan berat dalam hidupku dalam suka dan duka.*

Kakak, adik, dan saudara yang turut memberi doa dan semangat

Sahabat-sahabatku senasib sepenanggungan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, skripsi berjudul **“ANALISIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LAUT TADOR KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA ”**, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, agar kita menjadi orang-orang yang intelektual.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada yang teristimewa kedua orang tua saya Ayahanda Chairuddin Damanik, dan Ibunda Sri Wahyu Ningsih yang selalu memberikan dorongan, do'a, semangat dan dana kepada saya selama menyelesaikan studi di UMSU.
2. Bapak DR. Agussani, M.A.P selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. Bapak Januri S.E, M.M., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Dr. Hj Lailan Safina HSB, M.Si, selaku dosen pembimbing yang membimbing proses jalannya penyusunan skripsi serta memberikan motivasi dan arahan.
5. Ibu Dr. Prawidia Hariani S.E, M.Si, sebagai ketua program studi jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran .
6. Ibu Dra. Roswita Hafni M.Si, selaku sekretaris program studi jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan pegawai jurusan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis.
8. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si, selaku dekan FE UMSU beserta Bapak Januri S.E, M.M., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada hartono selaku kekasih yang selalu memberi penyemangat dan memberi motivasi terhadap skripsi saya ini.
10. Kepada siti riana sari tika christy selaku teman seperjuangan yang berusaha dan saling memotivasi agar penulisan skripsi ini dapat terwujud
11. Kepada keluarag besar IESP A angkatan 2014 selaku sahabat yang mendukung dan memberi informasi sejak penulisan hingga akhir skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini memperkaya khasanah ilmu ekonomi kita.

Medan, 2018

Penulis

Viona Kesuma Ningrum Damanik

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	13
1.3. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	13
1. Batasan Masalah.....	14
2. Rumusan Masalah	14
1.4. Tujuan Penelitian	14
1.5. Manfaat Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1. Pembangunan Ekonomi.....	17
1 Teori Pembangunan Adam Smith	18
2 Teori David Ricardo.....	22
3 Teori Malthus Mengenai Pembangunan Ekonomi.....	29
2.2. Pengeluaran Pemerintah.....	33
1. Teori Adolf Wagner (Hukum Wagner)	34
2. Teori Peacock dan Wiseman.....	36
3. Teori Rostow dan Musgrave.....	37
2.3. Kebijakan Pemerintah	42
2.4. Alokasi Dana Desa (ADD)	49
2.5. Sumber Keuangan Desa	54

2.6. Penelitian Terdahulu	55
2.7. Kerangka Konseptual	57
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	58
3.1. Pendekatan Penelitian	58
3.2. Defenisi Operasional Variabel.....	58
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	60
3.4. Jenis dan Sumber Data	60
3.5. Teknik Pengumpulan Data	61
3.6. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
4.1 Deskripsi Daerah Penelitian	63
4.1.1 Kondisi Geografi.....	63
4.1.2 Kondisi Demografi.....	65
4.2 Perkembangan dan Penggunaan Alokasi Dana Daerah.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, Daerah propinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah kota. Setiap Daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintah daerah yang mengatur undang-undang. Pemerintahan daerah propinsi. Daerah Kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Kabupaten, kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara.

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang dimaksud kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur. Untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota adalah walikota. Kepala daerah dibantu oleh suatu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil Bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota.

Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah. Sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Makna pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah. Camat dapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam UU nomor 32 Tahun 2004 adalah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meski titik berat otonomi diletakkan pada tingkang Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut

harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu Desa. Sehingga pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa. Selama ini , pembangunan desa masih banyak tergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari pemerintah kabupaten, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (*top down*).

Meskipun programnya baik tetapi sering tidak ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa, sehingga sering dijumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung program maupun memeliharanya . pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah kepastian untuk pembiayaannya.

Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintahan, swasta maupun masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam PP 72/2005 tentang Desa, dalam pp ini juga mengatur sumber pembiayaan bagi Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa yang berbentuk hibah ataupun donasi.

Beberapa kabupaten telah melakukan inovasi dengan pengalokasian dana langsung ke Desa dari APBD-nya untuk mendukung pembangunan di wilayah

pedesaan Alokasi Dana ke desa ini, telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah Kabupaten.

Dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dokumen perencanaan di desanya.

Beberapa manfaat dari alokasi dana ke desa adalah:

1. Masyarakat pedesaan akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena pengambilan kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka sendiri yang mengambil bagian dari pengambilan keputusan.
2. Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistis, karena dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat.
3. Kontrol langsung secara intensif dari masyarakat sehingga memungkinkan dana dapat meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan dan penyelewengan.

Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang pengeluarannya melalui kas desa ADD dimaksudkan untuk pembiayaan program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat adapun dimaksud pemberian ADD adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan.

Adapun tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan/kelurahan
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi kemasyarakatan mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat-Daerah sejak adanya wacana memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antar pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintahan Desa. Artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan Desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa

pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintahan dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalinya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk menguasai serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dijalankan melalui pemerintah Desa untuk dapat menjalankan peranannya secara efektifitas dan efisien. pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan Desa merupakan kegiatannya yang semestinya

menjadi prioritas utama sehingga pembangunan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintah senantiasa aktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup. bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "autonomy" identik dengan "auto money", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

1. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, aset desa ,swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain lain pendapatan asli desa ;
2. APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Dana Desa ;
3. Bagian dari pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten /kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada Desa-desanya yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10% setelah dikurangkan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dasar hukum pengalokasian Dana perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam pasal 72 ayat (6), dimana pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana perimbangan setelah dikurangkan Dana Alokasi Khusus. Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam kaitan dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa. Pemerintahan kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap desa melalui peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan

partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih banyak permasalahan, baik dibidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa (ADD). Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung sehingga pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh kepala Desa sehingga pada saat musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Salah satu permasalahan yang selalu menjadi concern di Indonesia adalah pemerataan pembangunan yang sesuai dengan porsinya, saat ini pemerintah sangat memerhatikan pembangunan desa. Undang-Undang tentang desa pun tertuang pada UU Nomor 6 tahun 2014. Tidak lama dari sana muncul pula PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang penjabaran Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2016 dinyatakan bahwa kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pertanggung jawaban kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa sebagai tugas-tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggung jawaban Kepala Desa selaku pimpinan pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa untuk disampaikan kepada

para pemangku kepentingan atau *stakeholders* (Bupati, Camat, BPD dan masyarakat).

Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib disampaikan secara insidental atau sewaktu-waktu dan secara periodik (seperti laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran, laporan akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa).

Berdasarkan ketentuan pasal 48 peraturan pemerintah Tahun 2016 yang berbunyi :Kepala Desa Wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap tahun anggaran kepada Bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir masa jabatan kepada Bupati/walikota;
- c. Menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban secara tertulis kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) setiap tahun anggaran.

Sumber Pendapatan Desa yang dianggarkan dari APBN/APBD

Sumber alokasi	Perhitungan
Alokasi APBN, berasal dari belanja pusat dengan mengefektif program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan dana desa	10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap
Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota	10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah

	dikurangi DAK. Bagi Kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana desa, pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan, setelah dikurangi DAK, yang seharusnya disalurkan ke desa
Bagian dari pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota	Paling sedikit 10% dari total pajak APBD Kabupaten/Kota

(Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa)

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat masalah yang timbul yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tidak efektif dalam mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa yang diperuntukan untuk membangun infrastruktur pada wilayah pedesaan di Indonesia.
2. Perangkat Desa yang tidak paham, dan mengerti cara pembukuan pengelolaan dana Desanya.
3. Perbedaan karakteristik suatu desa dapat mengindikasikan bahwa Alokasi Dana Desa yang dibagikan secara merata tidak digunakan secara benar untuk mengurangi ketimpangan ekonomi
4. Penggunaan yang tidak tepat dan pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa.

1.3. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan diteliti, sehubungan dengan data yang di peroleh dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa ada satu desa yang tertinggal menjadi berkembang dan satu desa yang berkembang menjadi mandiri, serta keterbatasan waktu, biaya dan sumber data maka batasan masalah yang difokuskan dari penelitian ini.yaitu analisis penggunaan alokasi dana desa di desa laut tador kecamatan sei suka kabupaten batu bara .

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang , identifikasi, dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilaksanakan di Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa laut Tador,kecamatan Sei Suka, kabupaten Batu Bara .
2. Bagaimana perkembangan Alokasi Dana Desa dan Penggunaannya di Desa laut Tador, kecamatan Sei Suka, kabupaten Batu Bara.
3. Bagaimana Efektivitas Alokasi Dana Desa laut Tador, kecamatan Sei Suka, kabupaten Batu Bara Tahun 2015 sampai tahun 2017.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisis deskriptif kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa laut Tador, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara.
2. Melakukan analisis deskriptif perkembangan dan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa laut Tador, Kecamatan Sei Suka, kabupaten Batu Bara.
3. Melakukan analisis efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa laut Tador, Kecamatan Sei Suka, kabupaten Batu Bara Tahun 2015 sampai tahun 2017.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat akademik :

1. Membantu perkembangan ilmu ekonomi terkhususnya ekonomi publik dan ekonomi pembangunan tentang kebijakan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam mengetahui evaluasi kebijakan alokasi dana desa
3. Memberikan pengetahuan dalam mengelola anggaran pemerintah khususnya Alokasi Dana Desa.

b. Manfaat non akademik :

1. Bagi pemerintah daerah di desa laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan kebijakan daerah khususnya Alokasi Dana Desa.

2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
3. Dapat menjadikan suatu pemahaman bagi para pembaca agar memberikan suatu ilmu.

BAB II

LANDASAN TOERI

2.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi atau proses peningkatan pendapatan per kapita yang disertai dengan proses transformasi dari suatu perekonomian yang dominan sektor industri, terutama industri manufaktur dan sektor jasa. Berdasarkan pengertian pembangunan ekonomi tersebut maka pembangunan ekonomi menjadi proses yang multi dimensional dengan tujuan peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang, pengelolaan sumber – sumber yang ada seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Banyak orang yang masih belum dapat membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pengertian pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang berbeda dimana pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dimana pendapatan per kapita penduduk suatu negara secara riil cenderung naik secara terus menerus dalam jangka panjang, dengan syarat utama jumlah penduduk yang berada dalam garis kemiskinan absolut tidak bertambah dan distribusi pendapatan tidak menjadi timpang. Namun pengertian pembangunan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari peningkatan

pendapatan per kapita melainkan kualitas pembangunan ekonomi yang baik seyogyanya tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.

Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi – institusi baru, pembangunan industri – industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar – pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan – perusahaan baru, dimana kesemuanya ini merupakan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat di daerah. Pembangunan ekonomi dapat juga disebut sebagai pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayahnya dan dalam konteks ini istilah yang paling tepat digunakan adalah pembangunan wilayah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi berisi strategi pembangunan daerah yang dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional. Pengertian pembangunan dalam hal ini banyak digunakan para pembuat kebijakan sebagai usahanya membangun stabilitas perekonomian negara. Berikut beberapa teori tentang pembangunan ekonomi:

1. Teori Pembangunan Adam Smith

Adam Smith (1723-1790) bapak dari ilmu ekonomi modern yang terkenal dengan teori nilainya yaitu teori yang menyelidiki faktor-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) yang terkenal dengan buku *Wealth of Nations* yang tema pokoknya mengenai bagaimana perekonomian itu tumbuh. Adam Smith

melihat proses pertumbuhan ekonomi itu dari dua segi yaitu pertumbuhan output (GNP) total, dan pertumbuhan penduduk. Pembagian kerja merupakan titik permulaan dari teori pembangunan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. (Jhingan: Pembangunan Ekonomi dan Perancangan halaman 81)

Menurut Smith, sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh. Sumberdaya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Stok modal, menurut Smith, merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai “batas maksimum” dari sumber alam).

Pengaruh stok modal terhadap tingkat output total bisa secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung ini maksudnya adalah karena penambahan modal (sebagai input) akan langsung meningkatkan output. Sedangkan pengaruh tidak langsung maksudnya adalah peningkatan produktivitas per kapita yang dimungkinkan oleh karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih

tinggi. Semakin besar stok modal, menurut Smith, semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas per kapita.

Spesialisasi dan pembagian kerja ini bisa menghasilkan pertumbuhan output, menurut Smith, karena spesialisasi tersebut bisa meningkatkan ketrampilan setiap pekerja dalam bidangnya dan pembagian kerja bisa mengurangi waktu yang hilang pada saat peralihan macam pekerjaan. Menurut Smith, potensi pasar akan bisa dicapai secara maksimal jika, dan hanya jika, setiap warga masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pertukaran dan melakukan kegiatan ekonominya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembenahan dan penghilangan peraturan-peraturan, undang-undang yang menjadi penghambat kebebasan berusaha dan kegiatan ekonomi, baik antara warga masyarakat di suatu negara maupun antara warga masyarakat antarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa Adam Smith merupakan penganjur *laissez-faire* dan *free trade*. Faktor penunjang yang kedua yaitu tingkat keuntungan yang memadai. Tingkat keuntungan ini erat hubungannya dengan luas pasar. Jika pasar tidak tumbuh secepat pertumbuhan modal, maka tingkat keuntungan akan segera merosot, dan akhirnya akan mengurangi gairah para pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal. Menurut Adam Smith, dalam jangka panjang tingkat keuntungan tersebut akan menurun dan pada akhirnya akan mencapai tingkat keuntungan minimal pada posisi stasioner perekonomian tersebut.

Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-

pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun. Tingkat upah yang berlaku, menurut Adam Smith, ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja (D) tumbuh lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja (S). Sementara itu permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output.

Kritik terhadap Teori Adam Smith

Seperti digambarkan di muka, teori Adam Smith ini telah memberikan sumbangan yang besar dalam menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi terjadi dan faktor-faktor apa yang dapat menghambatnya. Namun demikian, ada beberapa kritik terhadap teori Adam Smith antara lain:

1. Pembagian Kelas dalam Masyarakat

Teori Smith ini didasarkan pada lingkungan sosial ekonomi yang berlaku di Inggris dan di beberapa negara Eropa. Teori ini mengasumsikan adanya pembagian masyarakat secara tegas yaitu antara golongan kapitalis (termasuk tuan tanah) dan para buruh. Padahal dalam kenyataannya, seringkali kelas menengah mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat modern. Dengan kata lain, teori Smith mengabaikan peranan kelas menengah dalam mendorong pembangunan ekonomi.

2. Alasan Menabung

Menurut Smith orang yang dapat menabung adalah para kapitalis, tuan tanah, dan lintah darat. Namun ini adalah alasan yang tidak adil, sebab tidak terpikir olehnya bahwa sumber utama tabungan di dalam masyarakat yang maju adalah para penerima pendapatan, dan bukan kapitalis serta tuan tanah.

3. Asumsi Persaingan Sempurna

Asumsi utama teori Adam Smith ini adalah persaingan sempurna. Kebijakan pasar bebas dari persaingan sempurna ini tidak ditemukan di dalam perekonomian manapun. Sejumlah kendala batasan malahan dikenakan pada sektor perorangan (misalnya larangan monopoli) dan perdagangan internasional (misalnya adanya proteksi) pada setiap negara di dunia.

4. Pengabaian Peranan *Entrepreneur*

Smith agak mengabaikan peranan entrepreneur dalam pembangunan. Padahal para entrepreneur ini mempunyai peranan yang sentral dalam pembangunan. Mereka inilah yang menciptakan inovasi dan pada akhirnya menghasilkan akumulasi modal.

5. Asumsi *Stasioner*

Menurut Smith, hasil akhir suatu perekonomian kapitalis adalah keadaan stasioner. IN berarti bahwa perubahan hanya terjadi di sekitar titik keseimbangan tersebut. Padahal dalam kenyataannya proses pembangunan itu seringkali terjadi teratur dan tidak seragam. Jadi asumsi ini tidak realistis.

2. Teori David Ricardo

Teorinya tidak jauh beda dengan teori Adam Smith (perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output). Jumlah faktor produksi

(SDA, tanah) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (Jhingan dan Todaro). Teori Ricardo ini diungkapkan dalam bukunya berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation (1917)*. melalui teori Ricardian menganalisis mengenai proses terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah “ pada awalnya jumlah penduduk sangat rendah dan kekayaan alam masih melimpah. Dalam keadaan seperti ini para pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan kekayaan alam sebagai faktor produksi mengakibatkan para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang tinggi untuk mempertinggi tingkat modal yang dimiliki sehingga dapat mempertinggi produktifitas tenaga kerja. Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya kenaikan tingkat produktifitas maka para pekerja akan menuntut upah tinggi. Teori tersebut memunculkan beberapa asumsi yaitu :

1. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri
2. Berlakunya hukum : “ law of deminishing return “ bagi tanah
3. Persediaan tanah adalah tetap
4. Permintaan gandum benar – benar inelastik
5. Buruh dan Modal adalah masukan yang bersifat variabel
6. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu
7. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal
8. Harga penawaran buruh adalah tertentu
9. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal
10. Terdapat persaingan sempurna

11. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan

Teori David Richardo hadir dalam kondisi perekonomian yang dikuasai oleh kaum kapitalis yang menganggap bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan mengalami kenaikan yang signifikan bilamana faktor – faktor produksi diolah secara baik dengan sistem distribusi yang merata. Pemanfaatan teknologi pertanian kurang diperhatikan oleh David Richardo mengingat bahwa tenaga kerja adalah sumberdaya yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran yang terjadi.

David Ricardo membagi masyarakat dalam tiga golongan, yaitu :

1. Masyarakat pengusaha atau kapitalis, adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional.
2. Masyarakat pekerja atau buruh, adalah golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital.
3. Tuan tanah atau bangsawan, adalah golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan

David Ricardo mengemukakan beberapa teori, antara lain teori sewa tanah (land rent); teori nilai kerja (labor theory of value) dan upah alami (natural wages); dan satu lagi yang terkenal adalah teori keuntungan komparatif (comparative advantage) dari perdagangan internasional.

a. Teori Sewa Tanah

Dalam teori tentang sewa tanah ia menjelaskan bahwa jenis tanah berbeda-beda. Ada yang subur, kurang subur hingga tidak subur sama sekali. Produktivitas tanah yang subur lebih tinggi, dan demikian menghasilkan satu satuan unit produksi diperlukan biaya-biaya (biaya rata-rata dan biaya marjinal) yang lebih rendah pula. Makin rendah tingkat kesuburan tanah, jelas makin tinggi pula biaya rata-rata dan biaya marjinal untuk mengolah tanah tersebut. Makin tinggi biaya-biaya dengan sendirinya keuntungan per hektar tanah menjadi semakin kecil pula. Dengan penjelasan di atas adalah layak uang sewa untuk tanah yang lebih subur lebih tinggi jika dengan sewa tanah untuk tanah yang kurang subur apalagi yang tidak subur.

b. Teori Nilai Kerja dan Upah

Teori nilai kerja dan upah alami, David Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut, yaitu biaya untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk sekedar dapat bertahan hidup (subsisten) bagi buruh yang bersangkutan. Menurut Ricardo, kalau harga yang ditetapkan lebih besar dari biaya-biaya (termasuk upah alami), maka dalam jangka pendek perusahaan akan mengalami laba ekonomi. Adanya laba ini akan menarik perusahaan-perusahaan lainnya masuk pasar. Masuknya perusahaan-perusahaan baru berarti produksi akan meningkat dan sebagai akibatnya akan terjadi kelebihan produksi (over supply) di pasar. Kelebihan penawaran barang ini akan mendorong harga-harga turun kembali kepada keseimbangan semula. Karena biaya-biaya bahan mentah relatif konstan, maka Ricardo menyimpulkan bahwa

yang paling menentukan tingkat harga adalah tingkat upah alami, yang besarnya hanya cukup agar para buruh dapat bertahan hidup saja (secara subsisten). Selain itu, Ricardo mempertimbangkan kondisi pekerja, yang mana jika standar kehidupan minimum meningkat, maka upah minimum juga meningkat. Menurut Ricardo, ketika standar umum kehidupan meningkat, upah minimum yang dapat dibayarkan kepada pekerja juga meningkat. Dengan demikian, tingkat upah pada abad ke-19 tidak akan sama dengan tingkat upah pada abad ke-20. Hal ini mengisyaratkan bahwa Ricardo mengantisipasi adanya perubahan perekonomian secara menyeluruh.

Penilaian Kritis / Kebaikan Teori David Ricardo

David Ricardo adalah pelopor ahli ekonomi modern dan pendapatnya mengenai pertumbuhan ekonomi telah dianut oleh banyak kalangan. Pendapat-pendapatnya adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Pertanian

Pentingnya pembangunan pertanian dalam pertumbuhan ekonomi, sebab pembangunan industri tergantung pada sektor pertanian.

2. Tingkat Keuntungan.

Peningkatan tingkat keuntungan dalam pembangunan ekonomi sebab pemupukan modal tergantung pada kenaikan tingkat keuntungan.

3. Pentingnya Tabungan.

Pentingnya tabungan pada pemupukan modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi.

4. Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri sebagai sarana memperbaiki keadaan perekonomian sebab perdagangan luar negeri akan membawa pemanfaatan sumberdaya secara maksimum dan meningkatkan pendapatan.

5. Teori Dinamis

Ricardo menyajikan suatu teori yang dinamis yang menganalisa pengaruh perubahan dari berbagai variable pada pembangunan ekonomi seperti penduduk, upah, sewah, keuntungan dan sebagainya.

Kelemahan Teori David Ricardo

Disamping kebaikan, teori Ricardo mempunyai kelemahan tertentu, antara lain :

1. Mengabaikan pengaruh teknologi.

Pada mulanya kemajuan teknologi bisa menahan laju penurunan hasil. Tetapi akhirnya bila pengaruh kemajuan teknologi habis, hukum penurunan hasil berlaku lagi dan perekonomian bergerak menuju stasioner (law of diminishing return). Ricardo kurang memperkirakan potensi kemajuan teknologi dalam menahan menurunnya hasil tanah. Hal ini telah dibuktikan oleh negara-negara maju.

2. Pengertian yang salah tentang keadaan stasioner.

Pandangan Ricardo tentang mencapai keadaan yang stasioner secara otomatis tidak beralasan, sebab tidak ada perekonomian yang mencapai keadaan stasioner dengan keuntungan meningkat, produksi meningkat dan pemupukan modal tercapai.

3. Pengertian yang salah tentang penduduk.

Menurut Ricardo meningkatnya jumlah penduduk maka upah tidak dapat meningkat, tidak terbukti. Upah tidak cenderung menuju ke tingkat upah minimal. Sebaliknya, terjadi peningkatan upah yang terus menerus dalam bentuk upah uang dan dengan sendirinya penduduk cenderung menurun.

4. Kebijakan pasar bebas yang tidak dapat diterapkan.

Menurut Ricardo kebijakan pasar bebas tidak dapat diterapkan, bila ada campur tangan dari pemerintah karena perekonomian berjalan otomatis melalui persaingan yang sempurna.

5. Mengabaikan faktor-faktor kelembagaan

Salah satu cacat yang paling pokok dari teori Ricardo adalah diabaikan peran kelembagaan. Padahal faktor kelembagaan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan tidak dapat diabaikan.

6. Teori Ricardo adalah teori distribusi, bukan teori pertumbuhan.

Teori Ricardo bukanlah teori pertumbuhan tetapi teori distribusi yang menentukan besarnya bagian buruh, tuan tanah dan pemilik modal.

7. Tanah juga menghasilkan selain gandum.

Ricardo berpendapat dalam rangka pertumbuhan ekonomi hanya satu produk yang bisa dihasilkan dari tanah yaitu gandum. Ini adalah pendapat yang usang sebab ternyata tanah bisa menghasilkan berbagai macam produk selain gandum.

8. Modal dan buruh bukanlah koefisien yang tetap.

Asumsi Ricardo bahwa modal dan buruh merupakan koefisien produksi yang tetap adalah tidak benar. Asumsi ini tidak berlaku sebab buruh dan modal adalah variabel bebas.

9. Mengabaikan tingkat suku bunga

Kelemahan yang serius dari teori Ricardo adalah pengabaian tingkat suku bunga dalam pertumbuhan ekonomi. Ricardo tidak menganggap tingkat bunga sebagai suatu imbalan jasa yang terpisah dari modal tetapi termasuk dalam keuntungan. Pendapat yang salah ini berasal dari ketidakmampuannya untuk membedakan pemilik modal dari pengusaha.

10. Teori Ricardo dan negara terbelakang

Disamping kelemahan tersebut, teori Ricardo juga memperlihatkan pentingnya pemupukan modal melalui pembangunan pertanian, dan pentingnya perluasan berbagai sumber tabungan dan kenaikan tingkat keuntungan. Teori Ricardo tidak sepenuhnya dapat diterapkan di negara berkembang, tetapi ia dapat menunjukkan faktor yang menghambat tingkat perkembangan ekonomi di negara tersebut.

3. Teori Malthus Mengenai Pembangunan Ekonomi

Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malahan proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihak rakyat, memberikan gambaran adanya gerakan menuju keadaan stasioner tetapi menekankan bahwa perekonomian mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan.

Jadi, menurut Malthus, proses pembangunan adalah suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi lebih dari pada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi.

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Pada bukunya *Principles of Political Economy*, Malthus lebih realistis dalam menganalisa pertumbuhan penduduk dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi dibandingkan pada bukunya *Essay of Population*. Pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Sebagaimana ditulis Malthus : “Pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding.” Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi demikian mendorong pertumbuhan penduduk.

Peranan produksi dan distribusi. Malthus menganggap produksi dan distribusi sebagai dua unsur utama kesejahteraan. Jika keduanya dikombinasikan pada proporsi yang benar, ia akan dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara dalam waktu singkat. Tetapi jika keduanya dijalankan secara terpisah atau dikombinasikan pada proporsi yang tidak benar maka akan diperlukan beberapa ribu tahun untuk meningkatkan kesejahteraan. Faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi. Malthus mendefinisikan problem pembangunan ekonomi sebagai sesuatu yang menjelaskan perbedaan antara gross national product potential dan gross national product actual.

Proses akumulasi modal.

Akumulasi modal merupakan faktor paling penting bagi pembangunan ekonomi. Malthus mengatakan, “peningkatan kesejahteraan yang mantap dan berkesinambungan tidak mungkin tercapai tanpa penambahan modal secara terus menerus. Sumber akumulasi modal adalah laba. Malthus mengatakan : “kekayaan

suatu negara pada umumnya diciptakan oleh tabunagan yang disisihkan dari keuntungan yang meningkat, dan sama sekali karna pengurangan pengeluaran pada barang-barang mewah dan barang-barang kesenangan.

Kekurangan permintaan efektif. Pandangan Malthus ini didasarkan pada merosotnya permintaan efektif dan pada penolakannya terhadap hukum pasar yang dikemukakan Say. Malthus tidak sependapat dengan Say yang mengatakan bahwa di dalam pasar tidak mungkin terjadi over produksi atau penawaran yang berlebihan. Menurutnya, tidak seluruhnya benar bahwa komoditi selalu dipertukarkan dengan komoditi. Stagnasi ekonomi. Malthus yakin penawaran buruh dalam jangka pendek sangat tidak elastis. Dia mengatakan “ karena sifat dasar penduduk, kebutuhan tambahan pekerja untuk memenuhi permintaan tertentu, tidak dengan segera tersedia di pasar, sampai selang waktu enam belas atau delapan belas tahun.” Tetapi persediaan modal dapat ditingkatkan lebih cepat dibanding penambahan penduduk.

Langkah-langkah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.

1. Pertumbuhan berimbang. Di dalam sistem Malthus, perekonomian dibagi menjadi sektor pertanian dan sektor industri.
2. Menaikkan permintaan efektif. Akan tetapi kemajuan teknologi saja tidak dapat mendorong pembangunan ekonomi, kecuali kalau permintaan efektif meningkat.

Malthus menyarankan sejumlah langkah untuk menaikkan permintaan efektif :

1. Dengan pendistribusian kesejahteraan dan kepemilikan tanah secara lebih adil.

2. Permintaan efektif dapat ditingkatkan dengan memperluas perdagangan internal dan eksternal. Perdagangan internal sebagaimana juga perdagangan eksternal akan meningkatkan keinginan, selera, dan hasrat, untuk mengkonsumsi yang secara mutlak perlu untuk menjaga harga pasar komoditi dan mencegah berkurangnya laba.
3. Malthus menyarankan agar mempertahankan, “konsumen tidak produktif”
4. untuk meningkatkan permintaan efektif. Konsumen tidak produktif adalah orang-orang yang tidak memproduksi barang material. Malthus menyarankan program pekerjaan umum untuk mengatasi pengangguran dan menaikkan permintaan efektif. Malthus menunjukkan bahwa “mempekerjakan si miskin pada proyek jalan dan pekerjaan umum serta kecenderungan di antara para tuan tanah dan orang-orang kaya untuk membangun, memperbaiki dan mempercantik daerah mereka serta mempekerjakan pekerja pria dan buruh-buruh kasar, merupakan sarana untuk mengobati penyakit yang timbul dari gangguan pada keseimbangan antara produksi dan konsumsi tersebut. Tetapi dia sendiri mencatat ada dua kelemahan pada langkah ini. *Pertama*, langkah ini dapat menghalangi tenaga kerja dari kemungkinan menyesuaikan diri secara berangsur-angsur terhadap permintaan yang berkurang. Dia berpendapat, hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan upah rendah kepada pekerja. *Kedua*, langkah tersebut memaksa peningkatan pajak guna membiayai pekerjaan umum yang dengan demikian akan mengurangi investasi swasta. Tetapi bagi Malthus kelemahan ini sebenarnya merupakan keuntungan pekerjaan

umum karena hal itu tidak akan mempunyai kecenderungan mengurangi modal yang dipakai oleh tenaga kerja produktif.

2.2. Pengeluaran Pemerintah

Konsumsi atau pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah terdiri dari pendekatan teori makro.

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program. Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. (Suparmoko, 1998). Sedangkan pengeluaran dapat kita kelompokkan dalam dua golongan yaitu sebagai berikut :

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari : Belanja pegawai, yaitu untuk pembiayaan gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan. Belanja barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang. Belanja

pemeliharaan, yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik. Belanja perjalanan, yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintah.

Pengeluaran rutin memegang peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi, antara lain :

1. Teori Adolf Wagner (Hukum Wagner)

Berdasarkan pengalaman empiris dari negara – negara maju (USA, Jerman, Jepang), Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Meskipun demikian, Wagner menyadari bahwa dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, hubungan industri dengan

masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Kelemahan hukum Wagner adalah hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang publik, tetapi Wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Hukum tersebut dapat dirumuskan dengan notasi:

$$\frac{GpC_t}{YpC_t} > \frac{GpC_{t-1}}{YpC_{t-1}} > \frac{GpC_{t-2}}{YpC_{t-2}} > \dots > \frac{GpC_{t-n}}{YpC_{t-n}}$$

Ket;

GpC : Pengeluaran pemerintah perkapita

YpC : Produk atau pendapatan nasional per kapita

t : Indeks waktu

Hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Sehingga Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri dan hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks. Sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif semakin besar.

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah ada 5 hal yaitu tuntutan

peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

2. Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Namun masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

Menurut teori Peacock dan Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh sebab itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya adanya perang maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu pemerintah melakukan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Akan tetapi perang tidak hanya bisa dibiayai dengan pajak sehingga pemerintah juga harus meminjam

dari negara lain. Setelah perang selesai, sebetulnya pemerintah dapat menurunkan kembali tarif pada tingkat sebelum adanya gangguan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena pemerintah harus mengembalikan angsuran utang dan bunga pinjaman untuk membiayai perang, sehingga pengeluaran pemerintah setelah perang selesai meningkat tidak hanya karena GDP naik, tetapi juga karena pengembalian utang dan bunganya.

3. Teori Rostow dan Musgrave

Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah, ini ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Misalnya

pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air sehingga pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pada tahap lanjut, Rostow berpendapat bahwa pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Sementara itu, Dalam satu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta terhadap GNP semakin besar. Tetapi rasio investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil.

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak disadari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

Faktor Pengeluaran Pemerintah, Menurut Dr.Guritno Mangkoesoe-broto, M.Ec, perkembangan pengeluaran pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Perubahan permintaan akan barang publik.
2. Perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

3. Perubahan kualitas barang publik.
4. Perubahan harga faktor-faktor produksi.

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu dan bagaimana proporsinya terhadap penghasilan nasional. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tapi hendaknya kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan peranan pemerintah dalam suatu perekonomian. Pengeluaran pemerintah suatu negara menggambarkan suatu pembiayaan terhadap kegiatan pemerintah. Seperti telah diketahui, pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercermin dalam realisasi anggaran belanja rutin dan realisasi anggaran belanja pembangunan, sedangkan jumlah seluruh penerimaan meliputi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang disebut penerimaan pembangunan. Ditinjau dari tujuannya, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran operasional dan mutlak harus dilakukan serta konsumtif, tetapi tidak semua anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi (current expenditure), misalnya seperti belanja pembelian inventaris kantor, belanja pemeliharaan gedung kantor, dan lain-lain. Sebaliknya terdapat elemen pengeluaran pembangunan yang sebagian besar merupakan pengeluaran untuk investasi (capital expenditure) dapat dikategorikan sebagai pengeluaran yang bersifat konsumsi, seperti berbagai jenis upah dan gaji tambahan. Dari kedua jenis pengeluaran tersebut, pengeluaran pembangunanlah

yang memiliki sumbangan terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto nasional yang dilakukan pemerintah pusat (Matriks Investasi Pemerintah BPS).

Pengeluaran Pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan terutama untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat. Pembelian pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua golongan utama yaitu pengeluaran penggunaan pemerintah atau konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah (Sadono Sukirno, 2004).

Konsumsi pemerintah adalah pembelian atas pembelian barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti membayar gaji, membeli alat-alat kantor untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan pemerintah. Investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi, memberikan subsidi-subsidi, beasiswa bantuan untuk korban bencana alam tidak digolongkan sebagai pengeluaran pemerintah atas produk nasional karena pengeluaran itu bukanlah untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran konsumsi pemerintah di Indonesia tercermin dalam pengeluaran rutin, sedangkan pengeluaran investasi pemerintah tercermin dalam pengeluaran pembangunan.

Ditinjau dari tujuannya, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran operasional dan mutlak harus dilakukan serta konsumtif, tetapi tidak semua anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi. Misalnya seperti belanja pembelian inventaris kantor, belanja pemeliharaan

gedung kantor, dan lain-lain. Pengeluaran konsumsi yaitu pengeluaran rutin negara dalam hal ini belanja pegawai yang mencakup gaji dan pensiun, tunjangan serta belanja barang-barang dalam negeri, dana rutin daerah dan pengeluaran rutin lainnya yang berdampak konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat yang kemudian menaikkan fungsi konsumsi yang menyumbang kontribusi terhadap bruto nasional dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah ini secara tidak langsung merupakan investasi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Berkaitan dengan hal tersebut masalah pemilihan prioritas pengeluaran pembangunan tersebut merupakan hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun rencana anggaran pembangunannya.

Menurut (Dumairy, 2001) Di Indonesia, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi, yaitu:

1. Pengeluaran rutin yaitu, pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai; belanja barang; berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang); angsuran dan bunga utang pemerintah; serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut

antara lain diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen / lembaga negara non departemen, dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

2. Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

2.3. Kebijakan Pemerintah

Istilah kebijakan atau yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dihubungkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan (wewenang) untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.

Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sejak dari dari awal, pemerintahan indonesia memberlakukan kebijakan pembangunan daerah pinggiran. Pada pemerintahan presiden Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi, yaitu UU No 22/1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No 25/1999 mengenai Perimbangan Keuangan

antara Pusat dan Daerah. UU No 22/1999 mendelegasikan kekuasaan tertentu kepada pemerintahan daerah dan membentuk proses politik daerah. UU No 25/1999 mendorong desentralisasi dengan memberikan pembagian sumberdaya fiskal kepada pemerintahan daerah. Keadaan tersebut, terutama motivasi politik, tidak diragukan lagi mempengaruhi banyak aspek dalam otonomi daerah. Kedua UU di atas menegaskan adanya fungsi dan kewewenangan pemerintah daerah yang lebih besar dibandingkan UU No 5/1975. Oleh karena itu, beberapa pengamat menyebut diterapkannya pendekatan *big bang*, radikal, dalam struktur pemerintahan dan desentralisasi fiskal karena mengubah drastis pola hubungan pusat dan daerah (Mudrajad Kuncoro: 2014, Otonomi Daerah, 45).

Oleh sebab itu pada orde pemerintahan presiden Jokowi membuat kebijakan tentang pembangunan berbasis pinggiran yang di tandai terwujudnya Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Pendapat beberapa ahlitentang kebijakan pemerintah diartikan sebagai berikut ini:

1. Friedrik (1963) Berpendapat Bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan.
2. Menurut PBB: Kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai dasar pedoman (untuk) bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

3. Lasswell (1970) Berpendapat Bahwa kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals values and practices).
4. Carter V. Good (1959). Berpendapat Bahwa kebijakan merupakan sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting pada organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program maupun pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan bisa juga diartikan sebagai mekanisme politis, finansial, manajemen, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Definisi kebijakan pemerintah menurut para ahli sebagai berikut :

1. Thomas R. Dye mengatakan Kebijakan pemerintah merupakan apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan pada kenyataan, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali keinginan dan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya. (Soenarko, 2003:41).
2. Carl J. Friedrich mengatakan kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu. (Soenarko, 2003:42)

Paparan diatas merupakan pengertian dari kebijakan pemerintah. Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia memerlukan beberapa kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan baik di sektor infrastruktur maupun di sektor ekonomi. Pada sektor ekonomi pemerintahan sudah melakukan beberapa kebijakan yang bertujuan memperbaiki dan memajukan sektor ekonomi. Negara yang berkembang merupakan Negara yang dapat menstabilkan perekonomian dan mengurangi tingkat inflasi.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn. adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai

apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya:

1. Telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
2. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis;
3. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
4. Menjangkau dampak yang amat luas.
5. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.
6. Menyangkut suatu persoalan yang fashionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

Karakteristik Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Perlu kita ketahui mengapa kita harus mengetahui serta memahami setiap kebijakan yang ada, karena kebijakan tidak bisa dipahami secara tekstual, namun banyak sekali hal-hal yang tersirat(kontekstual) yang tidak diketahui oleh public dalam menetapkan kebijakan. Disinilah peran media sebagai fasilitator untuk tranformasi informasi kepada rakyat. Maka haruslah setiap media yang ada bersifat independen atau tidak terpengaruhi oleh kekuasaan politik tertentu. Selain media sebagai alat, masyarakat berperan untuk dapat menganalisis setiap kebijakan dan mampu membantu menyusun kebijakan yang ada. Inilah 2 tujuan mempelajari kebijakan pemerintah.

Ada dua akibat yang timbul dari penetapan kebijakan, yaitu: kebijakan yang berorientasi pada pelayanan public dalam arti sesuai dengan makna demokrasi dan kebijakan yang meracuni public/ kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja, dan hal dampak yang kedua ini sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi.

Seperti yang telah kita ketahui, salah satu fungsi politik adalah untuk membuat kebijakan dan kebijakan ada karena 2 faktor yaitu; adanya masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan pun berubah-ubah. Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara; Pembuatan Peraturan

UU, Perencanaan Kegiatan, Aneka intervensi terhadap ekonomi/social masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah.

2.4. Alokasi Dana Desa

Sebelum terlalu jauh membahas Alokasi Dana Desa berikut merupakan ulasan tentang desa. Desa, atau udik, menurut definisi "universal" adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

UU no. 22 tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten

UU no. 5 tahun 1979

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

UU no. 6 tahun 2014

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap urgen bagi desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya, baik personil, dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam PP No. 72 Tahun 2005 tersebut telah mengatur sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber pendapatan asli desa, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Salah satu bentuk transfer dari dana pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintahan

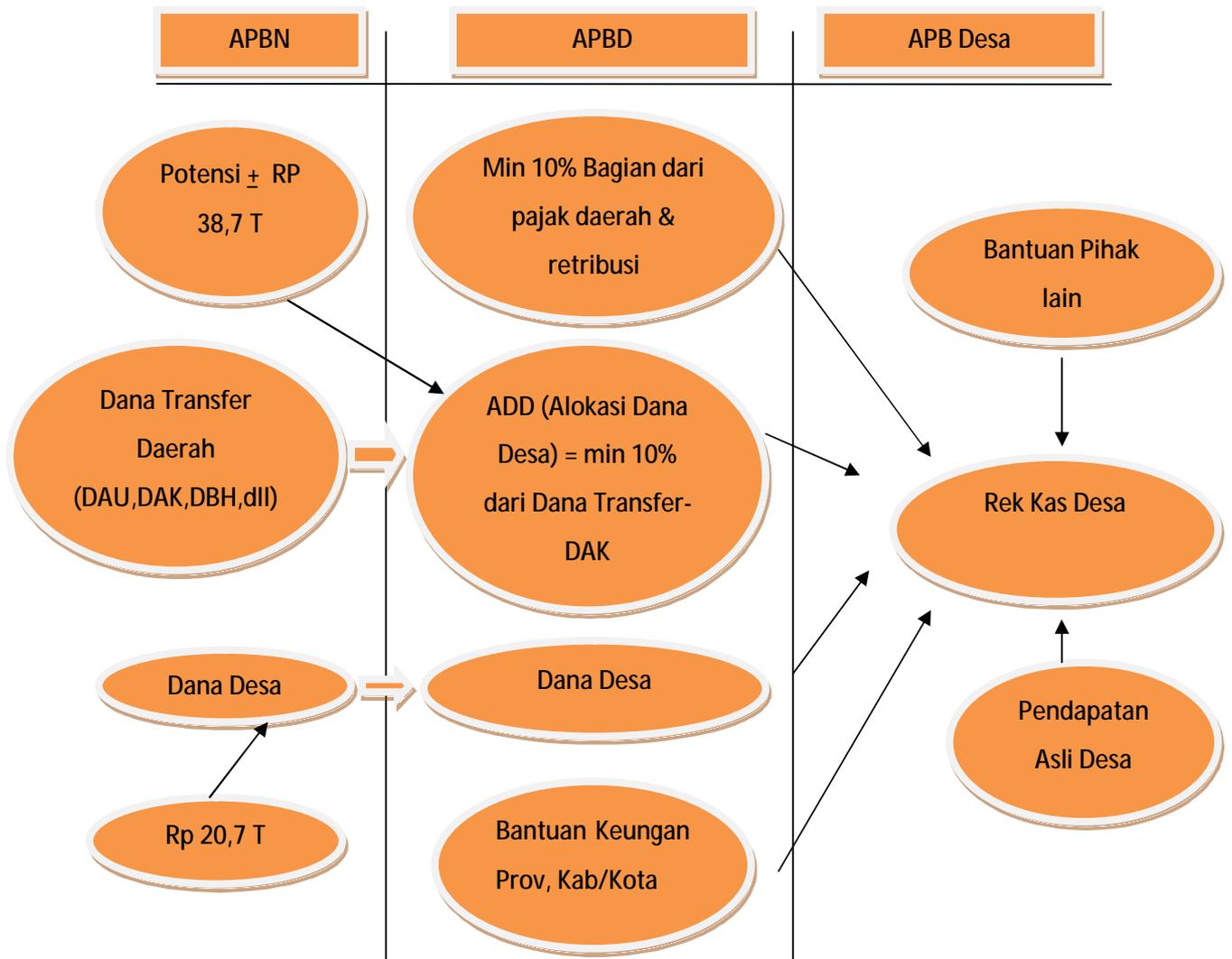
pusat dan daerah yang diterima masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketentuan formal yang mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) secara lebih jelas sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah tersebut ada dalam Permendagri No.37 Tahun 2007 pada bab IX. Dalam Permendagri tersebut telah cukup dijelaskan mulai tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), tata cara perhitungan besaran anggaran per-desa, mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), pengguna dana sampai dengan pertanggung jawabannya. Dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat, desa memiliki hak untuk mendapatkan dana perimbangan yang bersumber dari bagian pajak daerah dan retribusi daerah tertentu dan dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disingkat Permendagri No. 37/2007) dalam Pasal 1 ayat 2 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Dalam ayat 3 juga dijelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (selanjutnya disebut APBDDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan Peraturan

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

2.5. Sumber Keuangan Desa



Sumber : KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)

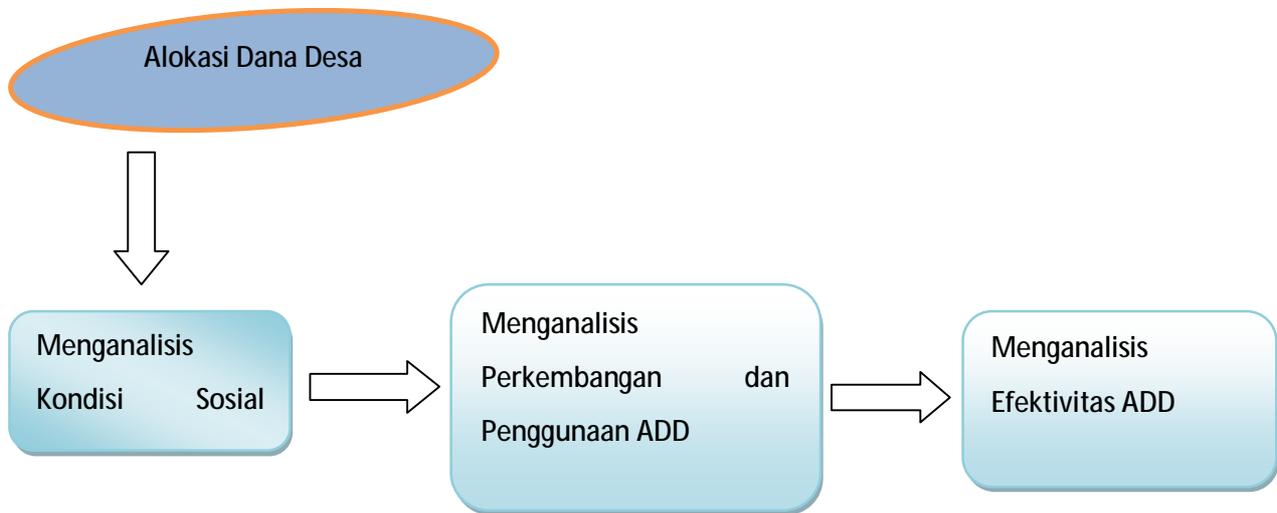
2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya :

Nama	Metode /Analisis Data	Hasil Penelitian
Andi Siti Sri Utami (2017) dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Abatireng	Metode Data Sekunder	Hasil penelitian menggambarkan secara umum Desa Abatireng yang meliputi sejarah ,kondisi geografis , Aspek sosial dan aspek pendidikan ,selain itu bab inimenguraikan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor-faktor yang berpengaruh baik itu sifatnya menghambat dan mendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Rahma Yulita (2016) Dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako	Metode Data primer	Pembahasan yang berdasarkan pengamatan dan wawancara mendalam tentang efektifitas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada umumnya efektifitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi.
Okta Rosalinda LPD (2014) Dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan.	Metode Observasi, Wawancara ,Dokumentasi serta Triangulasi dan Redukasi.	ADD sebagai perwujudn desentralisasi bidang pengelolaan keuangan pada desa harus memberikan dampak yang lebih baik pada pembangunan desa .untuk membuat kemandirian (otonomi) desa itu, dibutuhkan dua daya

		<p>dukung pertama,desentralisasi dari negara yang membagikan kekuasaan, kewenangan ,keuangan, kepercayaan dan tanggung jawab kepada desa .kedua, basis lokal yang tumbuh didalam desa (swaday , modal sosial, adat dan kapasitas, sumberdaya ekonomi.</p>
<p>Candra Kesuma Putra,Ratih Nur Pratiwi, Suwondo.Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa,pada Desa Wonorejo.</p>	<p>Metode Kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif</p>	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wonorejo menunjukkan bahwa sebagian dari Dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya</p>
<p>Virgie Dewawillia Kharisma,Anwar, dan Supranoto 2008-2012. Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Pasongsongan.</p>	<p>Metode Deskriptif Lungitudinal dengan Pendekatan Kualitatif.</p>	<p>selama lima tahun anggaran terakhir ini memperlihatkan bahwa dari tiga tahun anggaran yang berkonsentrasi pada pembangunan sarana dan prasarana pemerintah desa sebagai wujud dari 70% ADD yang dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.</p>

2.7. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian deskriptif. Tipe Penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa. Menurut Bogdan dan Taylor dalam ley J (1996), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

3.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian.

Penafsiran terhadap variabel penelitian diperlukan untuk menghindari penafsiran yang berbeda. Definisi variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 1998). Adapun definisi operasional untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Defenisi	Sumber Data
1	Infrastruktur a. Jalan b. Sarana Kesehatan publik c. Rumah Ibadah d. Fasilitas Kantor Desa e. Dan lain-lain	Sarana fisik maupun nonfisik yang dibangun dan dirawat pemerintahan desa agar menunjang perekonomian dan memberikan akses bagi penduduk desa.	www.Batubara.bps.go.id dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
2	Alokasi Dana Desa a. Besaran Transfer Alokasi Dana Desa b. Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Desa	Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kotadan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.	www.kemenkeu.go.id , www.kemendes.go.id dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(LPPD)
3	Ekonomi a. Pengelolaan Keuangan Desa b. Pengelolaan APBDes c. Pengelolaan BUMDes	Salah satu indikator yang menggambarkan maju atau berkembangnya satu individu maupun suatu daerah yang melakukan kegiatan produksi ataupun konsumsi dan kegiatan ekonomi lainnya.	www.Batubara.bps.go.id dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa laut Tador, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dimana titik pengambilan data penelitian tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa. Ialah sehubungan dengan data yang diperoleh dari Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi bahwa ada satu desa yang tertinggal menjadi berkembang serta satu desa yang brerkembang menjadi mandiri keterbatasan waktu dan *link* untuk mengambil data.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Januari hingga Bulan Februari tahun 2018.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Tipe Penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa. metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau *literature* yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa dari Kementrian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara dan melakukan observasi lapangan di Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
2. Mengentri data yang diperoleh dari berbagai sumber ataupun observasi lapangan guna melihat perkembangan dan pertumbuhan subjek yang diteliti serta melakukan analisis.

3. Melakukan perhitungan proporsi Alokasi Dana Desa serta penggunaannya untuk infrastruktur fisik.
4. Memberikan *questioner* sederhana kepada aparat desa dan penduduk sekitar.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder, dan data primer bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Daerah Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografi

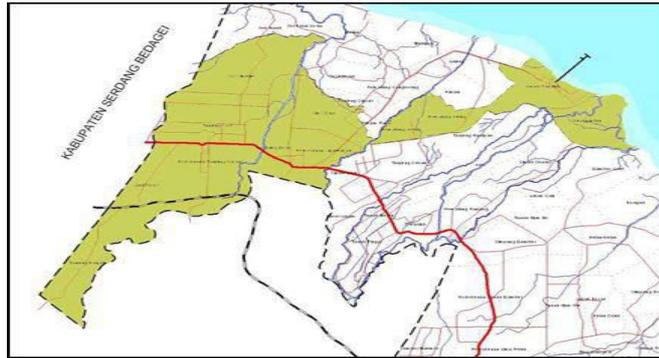
1. Letak

Desa Laut Tador merupakan salah satu dari 19 Desa dan 1 Kelurahan yang ada di Kecamatan Sei Suka. Desa Laut Tador terdiri dari 14 Dusun dan mempunyai luas + 878 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pelanggiran Laut Tador
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Kasau/ Kabupaten Simalungun
- Sebelah Barat berbatasan dengan Barat Perk. Tanjung Kasau /Kabupaten Sergai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perk Tanjung Kasau/ Kabupaten Simalungun.

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Pemukiman | : 112 Ha |
| 2. Perkebunan | : 475 Ha |
| 3. Lain-lain | : 291 Ha |
| 4. Tipologi Desa | : Cepat berkembang |
| 5. Kategori | : Dataran Tinggi |
| 6. Potensi Desa | : Wirausaha |
| 7. Agro Industri | : - |

Dengan ketinggian dari permukaan laut 8-10 mdl.



Gambar 4.1
Peta Kecamatan Sei Suka

2. Iklim

Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

Tabel 4.1
Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kecamatan Sei Suka, 2015

Bulan	Jumlah Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
(1)	(2)	(3)
Januari	7	90
Februari	5	187
Maret	1	6
April	1	6
Mei	6	140
Juni	4	75
Juli	8	217
Agustus	6	222
September	7	237
Oktober	8	377
November	12	476
Desember	3	118
2015	68	2151

Sumber : P.T. Moeis Perkebunan Sipare pare

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September ,Oktober dan November. Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

4.1.2 Kondisi Demografi

1. Jumlah Penduduk

Pada Tahun 2016 penduduk Desa Laut Tador pada akhir tahun 2016 sebanyak 4505 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 2282 dan penduduk perempuan 2223 jiwa, sedangkan jumlah KK pada Tahun 2016 sebanyak 1222 KK.

Tabel 4.2
Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin tahun 2016

No	Golongan Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-1	105	102	207
2	2-5	193	179	372
3	6-15	456	434	890
4	16-21	258	274	532
5	22-25	168	153	321
6	26-40	497	461	958
7	41-59	438	434	872
8	60 Keatas	192	198	390
	Jumlah	2307	2235	4542

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

Berdasarkan data komposisi penduduk umur Desa Laut Tador Memiliki penduduk yang berjenis kelamin Laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan.

2. Kelompok penduduk kategori sejahtera

Tabel 4.3
Pembagian kelompok penduduk yang kategori sejahtera tahun 2017

No	Pembagian kelompok penduduk	Persentase (%)
1	Miskin	50 %
2	Pra sejahtera	30 %
3	Sejahtera	20 %

Sumber : Kantor Desa / Kelurahan

Dapat kita lihat tabel diatas, pembagian kelompok penduduk yang kategori sejahtera di Desa Laut Tador ini sangat lah rendah karena berjumlah penduduk miskinnya 50% dan penduduk pra sejahterannya 30% sedangkan penduduk yang sejahtera 20%. Dapat kita simpulkan penduduk Desa Laut Tador ini lebih dominan kepada penduduk miskin.

3. Status Pemilikan Lahan

Dalam tabel dibawah ini dapat kita lihat bahwa luas lahan perkebunan yang terdapat di Desa Laut Tador sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat.

Tabel.4.4
Luas Lahan Menurut Status Kepemilikan Desa Laut Tador Tahun 2016

No	Status Kepemilikan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Milik Rakyat	478	4.78
2	Milik Desa	25	0.25
3	Milik Perkebunan	375	3.75
	Jumlah	878	8.87

Sumber : Kantor Desa / Kelurahan

Kondisi Lahan sebagian lahan perkebunan di Desa Laut Tador termasuk lahan yang berada di dataran rendah sehingga sering mengalami banjir ketika musim penghujan.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Penduduk Desa laut Tador sebagian bekerja sebagai petani di perkebunan milik pribadi, karyawan perkebunan swasta, sebagian lagi sebagai buruh tani dengan penghasilan pas-pasan yang diakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan apa lagi di kondisi saat ini semua harga bahan pangan sangat melambung tinggi sehingga pengeluaran lebih tinggi dari pemasukan.

5. Mata Pencaharian Desa Laut Tador

Tabel 4.5
Mata Pencaharian Desa Laut Tador 2017

No	Kegiatan	Persentase (%)
1	Bertani	40 %
2	Karyawan	20 %
3	PNS	5 %
4	TNI/ POLRI	3 %
5	Pedagang	20 %
6	Lain-lain	12 %

Sumber : Kantor Desa/ Kelurahan

Mata pencaharian masyarakat di Desa Laut Tador ini ,dimana kegiatan yang lebih tinggi adalah Bertani 40%, yaitu pertanian seperti ubi , jagung pisang dan ada juga Pedagang dan Karyawan masing-masing memiliki 20% yaitu karyawan perkebunan PT Paya Pinang perkebunan kelapa sawit. Untuk PNS sekitar 5% dan untuk TNI/POLRI 3% dan kondisi kehidupan ekonomi masyarakatnya .

6. Sarana Pendidikan

Tabel 4.6
Sarana Pendidikan di Desa Laut tador 2016

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SD Islamia berada didusun Beringin	1
2	SD Negri 014713 di dusun Cendana	1
3	SD Negri 010225 di dusun Simpang Tiga	1
4	SD Negri 018088 di dusun Afdiling Tiga	1
5	TK Assafat di dusun Flamboyan	1
6	TK satu atap di dusun Afdiling Tiga	1
7	TK Negri 01711 di dusun Batu Tohap	1
	Jumlah	7

Sumber : Kantor Desa / Kelurahan

Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa Sarana Pendidikan di Desa LautTador ini, yang ada hanya Pendidikan TK dan Pendidikan SD, kalau untuk Pendidikan SMP mereka pergi ke Desa sebelah yang terletak di Desa Pelanggaran. Untuk tingkat Pendidikan SMP hampir semuanya melakukan ke sekolah yang ada di luar Desa Laut Tador. Jarak yang akan ditempuh ke sekolah SMP Negri 2 Sei Suka 3 km.

7. Tingkat Pendidikan dapat dilihat di tabel berikut ini .

Tabel 4.7
Tingkat Pendidikan di Desa Laut Tador 2017

No	Jenis Kegiatan Utama	Jumlah
1	Belum / tidak memiliki Ijazah	44
2	SD / MI / Sederajat	690
3	SMP / MTS / Sederajat	753
4	SMA / MA / Sederajat	875
5	DI /D2/ D3	90
6	D4 / S1	51
7	Tidak / belum Sekolah	230
8	Masih Sekolah	755
9	Putus Sekolah	49
	Jumlah	3,537

Sumber : Kantor Desa / Kelurahan

Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa pendidikan didesa Laut Tador ini memiliki keinginan untuk bersekolah cukup baik,dari yang tidak memiliki ijazah sampai dengan pendidikan Perguruan Tinggi, dimana SD/MI berjumlah sebanyak 690 orang dan yang berpendidikan SMP/MTS sebanyak 753 orang pada pendidikan SMA/MA berjumlah 875 orang, sedangkan yang berpendidikan perguruan tinggi 51 sampai dengan 90 orang. dan ada juga di Desa Laut Tador ini berhenti sekolah karena tidak mampu / anak tersebut memang tidak ingin sekolah lagi .di Desa Laut Tador ini pendidikannya lebih tinggi kepada tingkat SMA/MA di dalam dunia pendidikan Desa Laut Tador mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup baik , hal ini disebabkan karena minat dan perhatian masyarakat Laut Tador dalam dunia pendidikan cukup baik. Masyarakat menyadari bahwa pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lewat pendidikan, kecerdasan dan keterampilan manusia. dan ada juga sebagian masyarakat di Desa ini berfikir pendidikan hanya menghabiskan uang saja.

8. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Desa Laut Tador diperlihatkan pada tabel di bawah ini

**Tabel 4.8
Kesehatan di Desa Laut Tador 2017**

No	Fasilitas Kesehatan	Tenaga Kesehatan	Dusun	Jumlah
1	Balai Pengobatan Bidan Anita	Bidan 1 dan pembantu 1	Cendana	1
2	Poskesdes	Bidan 2-3 dan pembantu 3-4	Cendana	1
3	Balai Pengobatan Riski dan Apotek	Mantri 1	Flamboyan	1
4	Balai Pengobatan Risma dan Apotek	Bidan 1 pembantu Apotek 1	Pekan Damai	1
5	Puskesmas Desa	Dokter 1 dan	Pekan Damai	1

	Laut Tador	Bidan/Perawat 3-4		
	Jumlah			5

Sumber : Kantor Desa / Kelurahan

Dapat di lihat dari tabel fasilitas kesehatan yang ada di Desa Laut Tador ini,yang memiliki jumlah tenaga kesehatan pada setiap Balai Pengobatan tidak terlalu banyak. Untuk mengetahui perkembangan pencapaian Desa Laut Tador Sehat diperlukan indikator yang harus dipantau setiap tahun. Beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah ketersediaan fasilitas, pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan, dan konsumsi makanan bergizi masyarakat. Tetapi faktor yang terpenting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan tersebut terletak pada manusianya sebagai subjek dan sekaligus objek dari upaya tersebut.

Tingkat Kesehatan di Desa Laut Tador ,

- Masih banyak yang belum mempunyai kartu BPJS
- Masih di bawah 40% yang memiliki kartu BPJS
- Kesadaran penduduk tentang kesehatan masih kurang
- Faktornya , tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya rasa untuk menjaga kebersihan 50%.

9. Kondisi Prasarana

Sarana perhubungan darat di Desa ini adalah

Tabel 4.9
Prasarana Hubungan Darat

NO	Jenis Prasarana	Kwantitas (Panjang)	Kwalitas (Keadaan)
1	Jalan Kabupaten	10.000 M	Sebahagian rusak
2	Jalan Desa	15.000 M	Sebahagian Cukup Baik
3	Jalan Dusun	7000 M	Kurang Baik
4	Jembatan	6 M	1 Unit Kurang Baik

Sumber : LPPD

Dari tabel diatas jalan desa sebanyak 1 Km , sudah lapen ,732 Meter Jalan rabat beton 2,5 Km baru perkerasan, dan sebagian lagi masih jalan biasa dan kurang baik. Jalan dusun sebagian cukup memprihatinkan tidak bisa dilalui para petani saat musim hujan dikarenakan berlubang dan berlumpur, transportasi yang banyak digunakan adalah sepeda motor.

4.2 Perkembangan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pendapatan Desa Laut Tador Tahun 2015-2017 dapat dilihat ditabel dibawah ini

Tabel 4.10
Sumber Pendapatan Desa Laut Tador
Tahun 2015-2017

No	Keterangan	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	155.920.000,00	342.400.000,00	638.500.000,00
2	Dana Desa (DD)	275.869.000,00	650.986.128,00	854.711.477,00
3	Bantuan Keuangan	10.000.000,00	193.000.000,00	-
Jumlah		441.789.000,00	1.186.386.128,00	1.493.211.477,00

Sumber : Kantor Desa/ Kelurahan

Dapat dilihat dari tabel Penggunaan dan Alokasi Dana Desa di Desa Laut Tador ini memiliki berbagai macam ragam kenaikan dan penurunan Alokasi Dana Desa tersebut. Desa pada Tahun 2015 ke 2017 mendapatkan Dana yang tinggi sedangkan Bantuan Keuangan pada Tahun 2015 – 2016 mendapatkan bantuan setiap tahunnya meningkatkan tetapi pada Bantuan Keuangan 2017 tidak sedikit pun mendapat kan Bantuan Keuangan.dari Dana-Dana tersebut digunakan untuk Kegiatan Desa pada setiap Tahunnya selalu meningkat.Pendapatan desa digunakan untuk berbagai kegiatan. Rincian penggunaan Pendapatan Desa Laut Tador dapat dilihat di tabel bawah ini

Tabel 4.11
Penggunaan Pendapatan di Desa Laut Tador

No	Kegiatan	Tahun 2015	%	Tahun 2016	%	Tahun 2017	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	159.920.000,00	36,2%	497.900.000,00	42%	453.972.615,00	32%
2	Bidang Pelaksanaan Pemb. Desa	275.869.000,00	62,4%	625.486.128,00	53,7%	818.766.477,00	58%
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.000.000,00	0,4%	9.000.000,00	0,76%	35.600.000,00	3%
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0	0	54.000.000,00	3,54%	105.408.000,00	7%
	Jumlah		100%		100%		100%

Sumber : Kantor Desa/ Kelurahan

Pada tabel Penggunaan Pendapatan Desa Laut Tador ini dapat dilihat dari Presentase setiap tahunnya ,untuk tahun 2015 Penggunaan yang paling tinggi untuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa 62% .yang paling rendah pada bidang pemberdayan masyarakat hanya 0% ,dan pada tahun 2016 penggunaan tertinggi pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa 53,7% ,dimana penggunaan yang paling rendah di bidang pembinaan kemasyarakatan 0,76% ditahun 2017 penggunaan yang tertinggi pada bidang pelaksanaan pembangunan desa 58% penggunaan yang paling rendah pada bidang pembinaan kemasyarakatan 3%.

Untuk pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Desa, rincian penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Rincin Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Laut Tador
Tahun 2015-2016

No	Kegiatan	2015	2016
1	<p style="text-align: center;">Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan (penghasilan tetap kepala Desa Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan BPD) - Operasional Perkantoran (belanja alat tulis kantor, makan/minum pelaksanaan rapat, foto copy, perjalanan dinas, benda pos, rekening listrik, alat kebersihan, perawatan dan pemeliharaan kendaraan kantor, perawatan dan pemeliharaan benda elektronik) - Operasional BPD - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa (rehab kantor desa) - Pengelolaan Informasi Desa (internet desa) 	159.920.000,00	497.900.000,00
2	<p style="text-align: center;">Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan jalan didusun simpang tiga : 302 x 3 M - Perkerasan jalan didusun palem : 150 x 3 M - Perkerasan jalan didusun palem : 100 x 2,5 M - Perkerasan jalan didusun pasar lima : 300 x 3 M - Pembangunan jalan rabat beton didusun pekan damai : 122 M - Pembangunan saluran drainase di dusun simpang tiga : 258 M - Pembangunan saluran drainase didusun palem 42 M - Pembangunan saluran drainase di dusu palem : 83 M + Palat 	275.869.000,00	625.486.128,00

	Deker 1 unit - Pembuatan jembatan didusun salak : 1 unit - Pembuatan joglo didusun PKS/ Danau : 1 unit		
3	Bidang Pembinaan Masyarakat - Operasional kegiatan PKK - Operasional kegiatan LPM	6.000.000,00	9.000.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0	54.000.000,00
	Jumlah	441.789.000,00	1.186.386.128,00

Sumber : Kantor Desa/ Kelurahan

Dapat kita lihat dari tabel rincin penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Laut Tador Tahun 2015-2016, kegiatan yang dilakukan di Desa Laut Tador ini sama, akan tetapi yang membedakan hanya jumlah pendapatan yang akan di laksanakan pada Desa Laut Tador dimana kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun 2015 memiliki presentase sebanyak 36,2% dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 42%. Dan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tahun 2015 sebanyak 62,4% pada tahun 2016 hanya 53,7% sedangkan pada Bidang Pembinaan Masyarakat tahun 2015 hanya 0,4% untuk tahun 2016 menjadi 0,76% , Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2015 hanya 0% pada tahun 2016 meningkat menjadi 3,54 %.itu lah rincian penggunaan pada tahun 2015-2016 pada setiap tahunnya mengalami perubahan turun naiknya penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Laut Tador. Sedangkan alokasi dana desa untuk tahun 2017, ditampilkan berikut ini.

Tabel 4.13
Alokasi Dana Desa di Desa Laut Tador Tahun 2017

No	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 701.753.477,00.	Dana Desa Tahun 2017 Rp. 854.711.477,00.
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 152.958.000,00.	
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	701.753.477,00
1	Perkerasan Jalan 675 M x 3 M di dusun Cendana	154.382.000,00
2	Perkerasan Jalan 650 M x 3 M di dusun Afdeling – Cinta Kasih	148.9992.000,00
3	Perkerasan Jalan 159 M x 3 M di dusun Batu Tohap	36.684.000,00
4	Rabat Beton Jalan 71 M x 2,50 M di dusun Beringin	37.141.000,00
5	Rabat Beton Jalan 222,5 x 2,79 M di dusun Pekan Damai	126.917.000,00
6	Rabat Beton Jalan 70 M x 2,50 M di dusun Batu Tohap	36.424.000,00
7	Pembangunan Drainase 139 M + Plat Deker di dusun Cendana	71.185.477,00
8	Pembangunan Drainase 122 M di dusun Cendana	52.926.000,00
9	Pembangunan Drainase 70 M di dusun Pasar Lima	26.323.000,00
10	Pembangunan Drainase 33 M di dusun Pekan Damai	10.779.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	152.958.000,00
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.000.000,00
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000,00
3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu dan Pelayanan Kesehatan	20.500.000,00
4	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan BUMDesa	93.500.000,00
5	Keg. Pemberdayaan dan Pembangunan System Informasi Desa	12.500.000,00
6	Kegiatan Pemberdayaan dan Penyuluhan Masyarakat	8.458.000,00

Sumber : Kantor Desa/ Kelurahan

Khusus untuk tahun 2017 sudah dibuat rincian yang lebih detail untuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa ditunjukkan pada tabel di atas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi Sosisl Ekonomi Masyarakat di Desa Laut Tador, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara. Pada umumnya Desa Laut Tador sebagian bekerja sebagai petani di perkebunan milik pribadi, karyawan perkebunan swasta, sebagian lagi bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan pas-pasan yang diakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan apalagi dikondisi saat ini semua harga bahan pangan sangat melambung tinggi sehingga pengeluaran lebih tinggi dari pada pemasukan.
2. Perkembangan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Laut Tador berkembang, hal tersebut terjadi karena pembangunan infrastruktur di desa tersebut lumayan pesat dan menyediakan berbagai sarana dan prasarana guna menunjang perekonomian disana. Tercatat 60% anggaran Alokasi Dana Desa di pergunakan untuk pembangunan infrastruktur dan selebihnya pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Desa Laut Tador.
3. Efektifitas Alokasi Dana Desa tepat dan berjalan lancar dalam membangun perekonomian Desa, hal itu di buktikan dengan adanya Alokasi Dana Desa yang dikelola langsung oleh pemerintahan desa serta melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan.

5.2.Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian proporsi setiap desanya haruslah berbeda, hal itu di sebabkan karena setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda jadi pengalokasian dan kebutuhannya juga berbeda.
2. Untuk menumbuhkan Sumber Daya Manusia harus di berikan beberapa pelatihan yang intensif. Pelatihannya sudah ada namun masih kurang intensif karena ilmu dari pelatihan yang diberikan juga hanya sekedar.
3. Masyarakat yang kurang mengerti tentang Alokasi Dana Desa seharusnya di berikan sosialisasi agar mengerti dan juga harus di tunjang dengan adanya fasilitas informasi tentang pengalokasian dana desa, tidak hanya di kantor desa saja melainkan di seluruh sudut pedesaan agar masyarakat desa mengetahui tentang Alokasi Dana Desa. Dan aparatur pedesa kurang transparansi dalam mengolah Alokasi Dana Desa karena minimnya baliho atau spanduk yang mendukung ketransparansian penggunaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- LPPD (*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*), 2016. *Kondisi Prasarana*
- Jhingan.2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Edisi Keenambelas.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajat.2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi Keempat.* Yogyakarta : Penerbit Erlangga.
- Kuncoro,Mudrajat.2014. *Otonomi Daerah, Edisi Ketiga.* Yogyakarta : Penerbit Erlangga.
- Michael, Stephen. 2011. *Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesebelas Jilid 2.* Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ni Kadek Darmiasih, Ni Luh Gd Erni Sulindawati dan Nyoman Ari Surya Darmawan.2015. *Analisis Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (Study Kasus Desa Tri Buana, Kec.sidemen, Kab.Karangasem.* Bali. Jurnal Ekonomi. Volume 1 No: 3. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).